

Oranye

Victor Christianto¹, email: victorchristianto@gmail.com

Pendahuluan

Kali ini izinkan saya bercerita tentang persoalan ekonomi Indonesia dalam konteks geostrategi.

Ceritanya, kemarin (24/8) saya sempat singgah selama beberapa jam di kota gudeg, Yogya, untuk menemui seorang kolega lama. Beliau adalah seorang ekonom, namanya Dr. David Widihandojo, dan kini beliau mengajar di pascasarjana UKDW. Saya pertama kali bertemu beliau ketika saya memenuhi undangan dari pascasarjana Studi Pembangunan di UKSW sekitar oktober 2008.

Waktu itu saya diminta mempresentasikan buku kami berjudul *Cultural Advantage For Cities* (1). Saya sangat menghargai integritas beliau sebagai ekonom yang menekuni ekonomi politik, namun tidak hanya menjadi idealis, beliau juga kerap terjun mengembangkan desa-desa binaan. Artinya seorang ekonom yang tidak puas hanya mengajar di ruang kuliah, namun juga berjuang dalam persoalan riil masyarakat. Beliau mengingatkan saya akan Prof. Amartya Sen (India) atau Prof. Muhammad Yunus (Bangladesh).

De-industrialisasi

Kebetulan kemarin pagi, waktu berangkat naik kereta, saya sempat membeli majalah Gatra edisi khusus menyambut 72 th kemerdekaan Indonesia, yang mengambil topik *Ekonomi Kerakyatan*.(2) Saya salut dan sangat mengapresiasi akan "keberanian moral" majalah tersebut yang mengangkat topik yang kerap dianggap sudah tidak relevan, dan di luar arus utama pemikiran ekonomi.

Ketika ketemu dengan pak David, saya langsung membuka salah satu halaman di majalah Gatra yang mengungkapkan bahwa meski ekspor migas Indonesia ke Asean menunjukkan peningkatan, namun ekspor nonmigas Indonesia ke Asean turun lebih dari 40% sejak 2015 hingga 2017. Lalu saya menanyakan apakah pendapat beliau sebagai ekonom, tentang faktor-faktor penyebab kemunduran ekspor tersebut: apakah mismanagement, industri yang tidak kompetitif, kelesuan ekonomi dunia, oversupply atau faktor geostrategis.

Jawaban beliau sebagai seorang ekonom profesional sungguh mengejutkan, beliau mengatakan bahwa sejak reformasi 1998, tidak ada masterplan besar pengembangan

¹ Founder of www.ketindo.com.

ekonomi nasional. Dan itu menyebabkan industri kita tidak memiliki arah yang jelas. Beliau menggambarkan bahwa Orde Baru sebenarnya juga tidak punya arah kebijakan ekonomi waktu Suharto mulai memerintah. Namun sebagai pemimpin, ia menyadari perlunya tim ekonom yang profesional, karena yang dilakukan Suharto pada prinsipnya adalah 2 hal pokok: a. mengadopsi kerangka pembangunan ekonomi yang digagas di era Orde Lama, b. menunjuk tim ekonomi yang terdiri dari lulusan Berkeley (disebut mafia Berkeley) termasuk di antaranya Widjojo Nitisastro dll serta membebaskan mereka untuk berkarya tanpa intervensi politis. Sehingga ekonomi bertumbuh pesat, dan mencapai banyak kemajuan signifikan, termasuk meluasnya partisipasi pendidikan, kesehatan yang membaik, barang-barang terjangkau, dan produksi pertanian meningkat. Hingga pada tahun 1980an Indonesia menjadi negara swasembada pangan.

Memang prestasi manis itu tidak berlangsung lama, karena agaknya Suharto yang mulai menjadi lanjut usia kurang tegas kepada intervensi militer dan juga masuknya kroni (sanak familinya) yang tumbuh menjadi konglomerat dengan berbagai fasilitas. Itulah yang akhirnya menjadi pemicu kesenjangan ekonomi yang membesar, dan akhirnya berujung pada Reformasi. Namun, setidaknya pemerintahan beliau berusaha keras mencapai kemajuan sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam GBHN.

Lalu bagaimana situasi pasca reformasi? GBHN dihapuskan, demokrasi mengarah ke corak parlementer dan ekonomi secara umum berubah haluan menjadi didominasi oleh kapitalisme global yang bercorak neoliberalisme. Tentu ada hal-hal positif juga yang dicapai selama reformasi, misalnya keberhasilan tim ekuin masa SBY dalam menghindari negeri ini dari dampak resesi global saat 2008-2009 ketika ekonomi Amerika dan Eropa dilanda krisis *secondary mortgage* akibat utang properti yang digelembungkan (Ponzi ekonomi).

Namun, pak David mengatakan, tidak ada upaya strategis untuk mengarahkan ekonomi Indonesia, sehingga praktis yang terjadi adalah hal-hal baik yang diraih negeri ini dalam konteks fundamental ekonomi itu mulai mengalami *decay* (merapuh). Ini bisa dilihat misalnya, pada melesunya kinerja ekspor serta defisit yang membengkak sejak masa pemerintahan kedua SBY.

Dan tampaknya pada era Jokowi kini, juga tidak seorang ekonom pun yang sekaliber Widjojo atau mafia Berkeley yang dipercaya untuk mengarahkan roda kebijakan ekonomi nasional. Masih belum ada masterplan strategi nasional. Dan juga belum ada GBHN yang diterima sebagai kerangka acuan ekonomi.

Namun saya juga membaca dalam edisi Gatra tersebut ada beberapa inisiatif positif, misalnya yang dipelopori oleh Dr. Din Syamsuddin dengan mengajukan uji materi terhadap produk perundangan yang bercorak neolib dan tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa seperti tertuang dalam UUD 1945. Tentu kita berharap bahwa upaya untuk mengoreksi pelbagai kebijakan yang keliru produk reformasi itu dapat terus dilakukan dengan didorong oleh Mahkamah Konstitusi.

Salah satu pekerjaan rumah, menurut hemat saya, mungkin adalah menganulir amandemen pasal 33 UUD, karena tambahan beberapa ayat produk amandemen itu justru terkesan dipaksakan dengan tujuan mementahkan dan mengaburkan cita-cita ekonomi kekeluargaan melalui koperasi.

Problem struktural

Selain membahas secara deskriptif apa yang sedang terjadi, kami kemarin juga berusaha memikirkan apa yang bisa dilakukan dalam tataran praktis.

Memang strategi pembangunan infrastruktur masif yang ditempuh pemerintahan sekarang perlu untuk jangka menengah dan panjang, namun apakah mungkin pemerintah agak terlena sehingga kurang memikirkan upaya riil untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya lapisan akar rumput? Selain itu, pembangunan infrastruktur menyedot secara masif sumberdaya ekonomi kita, namun efek multipliernya minimal karena jalan tol pada hakekatnya hanya menguntungkan pemilik mobil pribadi, jadi tidak menyentuh persoalan ekonomi riil. Mungkin itu salah satu penyebab mengapa terjadi kemerosotan signifikan dalam kinerja ekspor nasional ke Asean sejak 2015.

Tentu ada juga faktor-faktor lain misalnya:

a. Indonesia terlalu berkiblat ke Amerika, padahal ekonomi dunia sedang bergerak ke timur. Sebagai contoh, China baru saja merampungkan rute transportasi darat ke Burma dan ke Pakistan, dan di ujungnya dibangun dua pelabuhan besar. Sehingga praktis selat Malaka tidak lagi menjadi rute perdagangan laut. Dengan kata lain, menurut pak David, perubahan geostrategi ini berpotensi untuk menjadikan rute tol laut yang sedang dikerjakan secara masif oleh pemerintahan Jokowi menjadi *obsolete*, karena Indonesia jadi terpojok mirip *usus buntu*..

b. *oversupply* dunia: selain itu juga ada gejala meningkatnya produksi manufaktur dunia, yang menjadikan situasi ini adalah *oversupply* (kelebihan produksi). Ini mungkin juga menjadi pemicu turunnys harga barang di pasar internasional.(5)

c. de-industrialisasi: selain itu di dalam negeri juga terjadi proses deindustrialisasi, artinya menurunnya daya saing produksi lokal di tengah negara-negara Asia yang makin maju dan kompetitif.(4)

Lalu apa solusinya untuk memulihkan resiliensi ekonomi nasional?

Ekonomi oranye sebagai solusi alternatif

Menurut pak David, memang Indonesia tidak dapat mengandalkan manufaktur berteknologi tinggi yang memerlukan tenaga kerja dengan skill tinggi, selain juga modal yang besar. Namun ada banyak teknologi sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ekspor dengan cepat dan riil, tanpa banyak investasi awal. Beliau menyarankan teknologi tepat guna untuk pertanian, peternakan, perikanan, serta industri kreatif.

a. Perikanan: Misalnya, teknologi penyimpanan dingin (*cold storage*) untuk hasil perikanan dapat membuat ikan lebih awet, sehingga bisa dijual di pasar internasional dan harganya bisa mencapai \$20 per kg. Bandeng juga digemari oleh orang Jepang, dan ini dapat menjadi peluang ekspor karena harga yang bagus dapat mencapai \$30-\$40 per kg.

b. pertanian: Koes Plus menyanyikan lagu sejak dulu bahwa di negeri ini tongkat bisa tumbuh menjadi tanaman. Tapi kok ya nasib para petani tidak kunjung membaik dan malah cenderung dicitrakan sebagai kaum marjinal dalam sektor ekonomi. Perlu kebijakan perkebunan yang lebih berpihak rakyat, karena perkebunan kini cenderung menguntungkan korporasi besar, dan merekalah sumber kebanyakan kebakaran hutan.

c. Peternakan: sudah lama diketahui bahwa pabrik susu membentuk kartel yang tidak sehat dan cenderung mendikte harga kepada koperasi susu yang dimiliki peternak sapi perah. Harga susu di tingkat koperasi ditekan ke nilai yang membuat peternak sapi sulit memperoleh keuntungan yang wajar

d. Industri kreatif: merupakan sektor informal yang berpotensi besar untuk dikembangkan karena Indonesia sangat kaya dan beragam dengan warisan budaya di tiap daerah. Sayang sekali, menurut beliau, Departemen Industri Kreatif sudah dibekukan, dan pemerintah agaknya tidak memiliki masterplan untuk mendorong industri kreatif menjadi salah satu pilar penghasil devisa. Memang sudah ada Bekraf, tapi ya kok sepertinya lebih sering seminar daripada mengembangkan upaya nyata. (Ada kisah guyonan berikut, bahwa AS sudah punya teknologi roket sampai ke bulan, Thailand sudah mengembangkan pertanian yang maju, namun Indonesia juga tidak mau kalah...lalu menumpuk makalah seminar sampai mencapai bulan!)

Padahal buku **Orange Economy** menunjukkan bahwa potensi ekonomi kreatif (ekonomi oranye) itu sungguh dahsyat dan luarbiasa, dan ini tidak membutuhkan teknologi yang terlalu tinggi. (3)

Penutup

Demikianlah sekelumit diskusi kami berdua kemarin, yang sempat terrekam dalam memori saya. Kiranya berguna bagi para pembaca. Syukur-syukur kalau artikel ini dibaca oleh para pengambil kebijakan ekonomi nasional.

Bagaimana pendapat Anda?

Versi 1.0: 25 agustus 2017, pk. 12:06

VC

catatan: trimakasih kepada Dr. David Widihandojo.

Referensi:

(1) V. Christianto & F. Smarandache. Cultural advantage for cities: an alternative for developing countries. USA: InfoLearnQuest, 2008.

Url: <http://www.vixra.org/abs/1003.0200>

(2) Majalah Gatra, Ekonomi Kerakyatan. edisi khusus 72 tahun kemerdekaan RI. Jakarta: agustus 2017

(3) Felipe Buitrago Restrepo & Ivan Duque Marquez. Orange economy: potensi kreativitas yang tak terbatas. Jakarta: Noura Books : PT Mizan Publika, 2015.

(4) Stephen Elias and Clare Noone. The growth and development of indonesia economy.

Url: <http://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2011/dec/pdf/bu-1211-4.pdf>

(5) The Age of Oversupply: overcoming the greatest challenge.

Url: <https://www.goodreads.com/book/show/17707716-the-age-of-oversupply>